PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
(Pada 9 Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013)

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND BALANCED FUNDS TO LOCAL BUDGET (9 Municipal Goverment in West Java Since 2010-2013)

SINA MUHAMMAD SALMAN FARIZI

21111140

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Each local government (LG) which allocates personnel expense exceeds 51% of the budget, then local governments are prohibited from procuring civil servant concerned because it would burden the state budget. But in fact, in Indonesia at this time almost in half, or more than 50% of local governments to allocate personnel expense exceeds 50% of its own budget. The purpose of this study was to find out how the influence of the original income (PAD) and Fund Balance of the Regional Shopping in 9 cities in West Java Province 2010-2013.

This research method using descriptive and verification methods. In accordance with research title that Influence Local Revenue (PAD) and Fund Balance of the Shopping Area. It is known there are three variables in the title is revenue (PAD) (X1), Fund Balance (X2), and Expenditure (Y). The statistical test used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, analysis Partial Coefficient of Determination, and hypothesis testing.

These results indicate that the original income significantly influence regional expenditure, and Fund Balance significant effect on local shopping.

Keywords: *Local Revenue (PAD), the Fund Balance, and Shopping Area*

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menurut Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus ada tiga fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah, yaitu tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kesalahan pasar, program pemerintah untuk menigkatkan keadilan, dan kebijaksanaan stabilisasi yang berusaha untuk mengikis fluktuasi yang tajam dari siklus bisnis dengan cara menekan angka pengangguran dan inflasi serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5). Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5). Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda, serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5).

Negara disebut sehat jika pendapatannya lebih besar dibanding pengeluarannya, namun yang terjadi di Indonesia selama ini justru sebaliknya (Jusuf Kalla, 2014). Upaya meningkatkan pendapatan bisa dicapai ketika terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah (Jusuf Kalla,

2014). Pemerintah pusat bekerja secara sektoral yang dilaksanakan oleh gubernur di setiap daerah (Jusuf Kalla, 2014). Kemajuan di daerah akan sangat bergantung kepada kemajuan sektoral, namun kebijakan sektoral tidak akan berjalan jika tidak didorong kemajuan wilayah (Jusuf Kalla, 2014). Masalahnya adalah ketidak seimbangan antar wilayah, tetapi kita punya modal, ada potensi kekayaan alam, diuraikan dalam APBN dan APBD, lalu diubah menjadi program (Jusuf Kalla, 2014). Karena itu, daerah diminta untuk memahami bagaimana bentuk sinergi yang harus dijalankan bersama pemerintah pusat agar upaya meningkatkan pendapatan dapat terealisasi, sehingga tujuan memakmurkan masyarakat bisa dicapai (Jusuf Kalla, 2014).

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran (Solvador Pinto, 2011). Pemungutan semua penerimaan daerah serta pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah bertujuan untuk melaksanakan desentralisasi yang dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD (Solvador Pinto, 2011). Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Solvador Pinto, 2011).

Kinerja penyusunan RAPBD suatu pemerintah daerah digambarkan oleh porsi relatif (dalam %), porsi absolut (dalam Rupiah), dan kecenderungan (*trend* lintas tahun anggaran) belanja bagi publik yang semakin besar dibanding belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai bagi keperluan pemerintah daerah sendiri semakin kecil (Jan Hoesada, 2015). Setiap pemerintah daerah (Pemda) yang mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 51% dari APBD, maka Pemda bersangkutan dilarang melakukan pengadaan CPNS karena akan membebani APBN (Yuddy Chrisnandi, 2015). Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini hampir separuhnya atau lebih dari 50% Pemda mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD-nya sendiri (Yuddy Chrisnandi, 2015).

Karenanya, hal yang perlu dilakukan menurutnya ada dua hal, yaitu melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak perlu, dan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi kreatif di daerahnya (Yuddy Chrisnandi, 2015). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah".**

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1) Negara disebut sehat jika pendapatannya lebih besar dibanding pengeluarannya, namun yang terjadi di Indonesia selama ini justru sebaliknya
2) Ketidakseimbangan antar wilayah membuat pendapatan dan pengeluaran tiap daerah tidak sama
3) Di Indonesia hampir separuhnya atau lebih dari 50% Pemda mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD-nya sendiri

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1) Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
2) Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu (Sugiyono, 2014:283):

1) Kegunaan untuk mengembangkan ilmu/kegunaan teoritis
2) Kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti.

1.4.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti
   Peneliti mendapatkan hasil, manfaat, dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

2) Bagi Instansi
   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi instansi-instansi pemerintahan daerah tentang seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis penelitian ini adalah:

1) Bagi Akademisi
   Memberikan tambahan informasi bagi pengembang ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

2) Bagi Peneliti Lain
   Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut yang diperoleh dengan praktek di lapangan tentang seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Haw Widjaja, 2009:42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut (Aries Djaenuri, 2012:88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Kansil dan Christine, 2008:107) dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 poin a sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) Hasil pajak daerah
2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut (Aries Djaenuri, 2012:88) dalam pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

1) Hasil pajak daerah;
2) Hasil retribusi daerah;
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2.1.2 Dana Perimbangan

Menurut (Bachrul Elmi, 2002:54) selain dari PAD, sumber penerimaan Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten/Kota yaitu dari dana perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD).Menurut (Bachrul Elmi, 2002:55) Dengan terbitnya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan lebih memberikan keleluasaan (*descretion*) kepada daerah untuk melaksanakan otonomi dan menjalankan roda pembangunan. Selain dari pada itu, melalui kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian kue nasional yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar, sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Menurut (Aries Djaenuri, 2012:100) dana perimbangan adalah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2.1.1.1 Sumber Penerimaan Dana Perimbangan

Menurut (Ani Sri Rahayu, 2010:229) pendapatan dana perimbangan bersumber dari:

1) Pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB
2) Pendapatan daerah dari pajak penghasilan
3) Pendapatan bagian daerah dari SDA
4) Dana alokasi umum
5) Dana alokasi khusus.

2.1.1.2 Pengalokasian Dana Perimbangan

Pengalokasian Dana Perimbangan menurut (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2007:48,49,56) terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)
   Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
b) Dana Alokasi Umum (DAU)
   Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
   Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

2.1.2 Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Menurut (Abdul Halim, 2002:73) mengemukakan bahwa Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi *asset*, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Menurut (Nunuy Nur Afiah, 2010:15), yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah Belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut (Budi S. Purnomo, 2009:43), menjelaskan belanja daerah menurut kelompok bahwa Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Bunga
3. Subsidi
4. Hibah
5. Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tidak Terduga.

Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

1. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut (Ani Sri Rahayu, 2010:220-221) pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari belanja, bagi hasil pendapatan ke desa, dan pengeluaran pembiayaan. Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

1) Belanja Operasi, terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang dan Jasa
   c. Belanja Pemeliharaan

d. Belanja Perjalanan Dinas
e. Belanja Pinjaman
f. Belanja Subsidi
g. Belanja Hibah
h. Belanja Bantuan Sosial
i. Belanja Operasi Lainnya.

2. Belanja Modal, terdiri dari:
   a. Belanja Aset Tetap
   b. Belanja Aset Lainnya
   c. Belanja Tak Terduga.

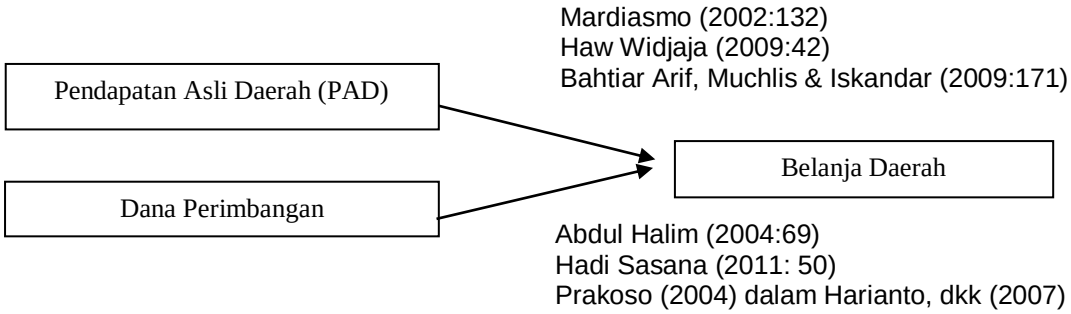
2.2 Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2002:132) Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 didukung oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan sumbangan serta bantuan pemerintah pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD. Menurut (Haw Widjaja, 2009:42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Menurut (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar, 2009:171) Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:69) Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut (Hadi Sasana, 2011: 50) Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. (Prakoso dalam Harianto, dkk, 2007), memperoleh temuan empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

H_2: Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis teliti adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pada 9 Pemerintah Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
3. Menetapkan rumusan masalah.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori.
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan.
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data.
8. Melakukan analisi data.
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Jenis Penelitian**	**Jenis Penelitian**	**Jenis Penelitian**
t-1	Deskriptif dan Verifikatif	Explanatory Survey	9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat	Time Series
t-2	Deskriptif dan Verifikatif	Explanatory Survey	9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat	Time Series

Sumber : Umi Narimawati dkk 2010.

Dari tabel di atas kemudian penulis menguraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asi Daerah terhadap Belanja Dearah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Dearah.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Diketahui ada tiga variabel dalam judul tersebut yaitu:

1) Variabel Bebas/*Independen* (X)

Menurut (Sugiyono, 2014:39), Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini variabel bebas yang akan diteliti yaitu X1 Pendapatan Asli Daerah dan X2 Dana Perimbangan.

2) Variabel tidak Bebas/*dependen* (Y)

Menurut (Sugiyono, 2014:39), Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas (Y) adalah Belanja Daerah.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti yaitu data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Belanja Daerah. Data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 9 Pemerintah Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013.

3.2.4Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian studi kepustakaan *(Library Reseach)* dan Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
   Untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini peneliti mempelajari buku dan jurnal mengenai keuangan daerah, metode penelitian, dan statistik.
2) Studi Lapangan (*Field Research*)
   Dengan mencari dan memperoleh data dari perusahaan/instansi yang penulis teliti dengan cara:
   a) Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
   b) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
   c) Dokumentasi, Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan/instansi. Adapun dokumen-dokumen tersebut dari Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 9 Pemerintah Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013.

3.2.5 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014:80), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013 yaitu sebanyak 36 periode.

3.2.6 Penarikan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014:81), Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukannya untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling.* Menurut (Sugiyono, 2014:218) *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *non probability sampling* yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh.

Menurut (Sugiyono, 2013:68) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013 yaitu sebanyak 36 periode.

3.3 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data yang dalam penelitian ini menggunakan

3.3.1 Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (*BLUE*).

a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinieritas
c. Uji Heteroskedastisitas
d. Uji Autokorelasi

3.4 Rancangan Analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014:147) dalam penelitian kuantitatif analisis data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.4.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2009:21) dalam (Umi Narimawati, 2010:29) mendefinisikan metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan metode analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hasil data yang diperoleh dan diolah. Dalam penelitian ini, metode deskritif digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

3.4.2 Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

   Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

   Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber: (Sugiyono, 2009:192)

Dimana:

Y = Variabel terikat (Belanja Daerah)
a = Bilangan berkonstanta
b1,b2 = Koefisien arah garis
X1 = Variabel bebas X1 (Pendapatan Asli Daerah)
X2 = Variabel bebas X2 (Dana Perimbangan)

2. **Analisis Korelasi**

   Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Digunakan untuk melihat sebarapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Besarnya koefisien determinasi parsial dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = B \times Zero\ Order \times 100\%$$

Sumber : Gujarati, (2003:172)

Dimana:

B = Standar koefisien Beta

Zero Order = Matrik korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini yang diuji adalah seberapa besar pengaruh Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada 9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi, dalam analisisnya menggunakan pengujian secara parsial.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan setiap variabel PAD, Dana perimbangan, dan Belanja Daerah pada Kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013, sedangkan analisis verifikatif dengan menggunakan pengujian regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja daerah.

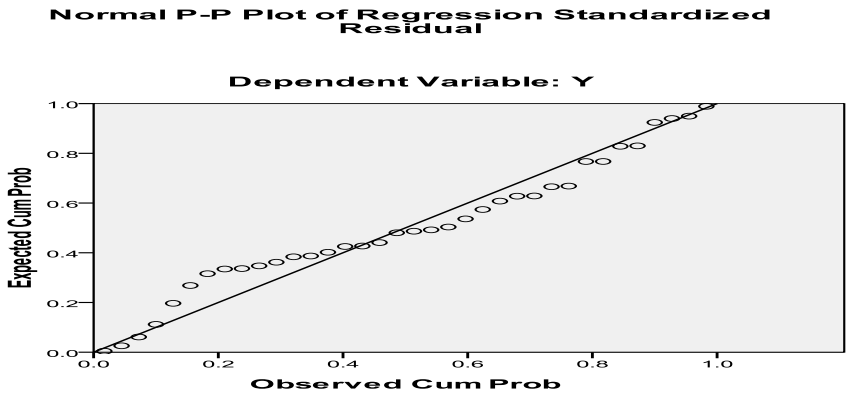
1. Anallisis Deskriptif

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Realisasi Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2010-2013, Kota Sukabumi Tahun 2010-2013, Kota Bandung Tahun 2010-2013, Kota Cirebon Tahun 2010-2013, Kota Bekasi Tahun 2010-2013, Kota Depok Tahun 2010-2013, Kota Cimahi Tahun 2010-2013, Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2013, dan Kota Banjar Tahun 2010-2013.

2. Analisis Verifikatif

Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-kofisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka asumsi regresi yang akan diuji adalah asumsi normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan Autokorelasi.

a. Pengujian Normalitas



Gambar 4.1
Grafik Normalitas

Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

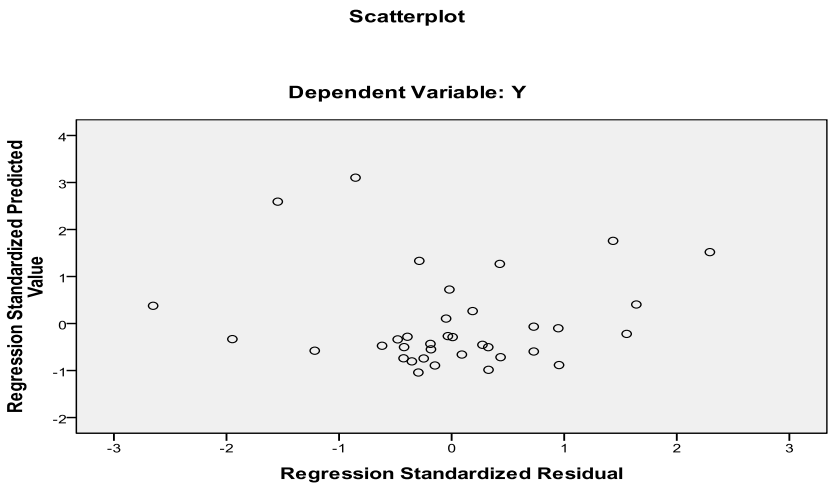
b. Pengujian Multikolinieritas

Tabel 4.1
Pengujian Multikoliniearity

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.129	7.775
	X2	.129	7.775

Menggunakan besaran tolerance (a) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel = 7,775< VIF = 10 dan semua tolerance variabel bebas 0,12 diatas 10%, dapat disimpulkan bahwa antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) tidak terjadi multikolinieritas.

c. Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 4.2
Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar di atas telihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbuh Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui bahwa terjadinya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan bantuan program SPSS 17.0 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.628

Dari tabel 4.2 diperoleh nilai d sebesar 1,628. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai $d_L$dan$d_U$pada tabel Durbin-Watson. Untuk α=0.05, k=2 dan n=36, diperoleh $d_{L=}$ 1,3537dan $d_{U=}$ 1,5872. Nilai d >d_U , maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

3. Analisis Regrrersi Linier Berganda

Tabel 4.3
Koefisien Regresi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.729E7	5.919E7		-.292	.772

	PAD	1.303	.173	.444	7.515	.000
	Dana Perimbangan	1.313	.137	.566	9.585	.000

Belanja Daerah= -1,729E7 + 1,303 PAD + 1,313 Dana Perimbangan

Untuk itu dari hasil perhitungan tersebut maka dapat diinterpretasikan, bahwa Jika tidak ada X_1 (PAD) dan X_2 (Dana Perimbangan) maka nilai Y (Belanja Daerah) akan turun sebesar Rp. 17.290.000 (konstanta). Dapat diartikan bahwa bila diasumsikan untuk PAD dan dana perimbangansebesar 0, maka belanja daerah akan turun sebesar Rp. 17.290.000 poin.

- Apabila diasumsikan untuk PAD sebesar 1, dana perimbangan sebesar 0 maka belanja daerah akan meningkat sebesar 1,303 poin.
- Apabila diasumsikan untuk dana perimbangan sebesar 1, PAD sebesar 0 maka belanja daerah akan meningkat sebesar 1,313 poin.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

a. Koefisien Korelasi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Tabel 4.4
Korelasi antara PAD dan Belanja Daerah

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.972	.980
	X1	.972	1.000	.933
	X2	.980	.933	1.000

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi PAD dengan Belanja Daerah yaitu Koefisien korelasi antara PAD dengan belanja daerah, r = 0,972, ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara PAD dengan belanja daerah.

b. Koefisien Determenasi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Tabel 4.5
Koefisien DeterminasiSecara Parsial
PADterhadap Belanja Daerah

Model		Standardized Coefficients	Correlations		
		Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)				
	X1	.444	.972	.794	.159
	X2	.566	.980	.858	.203

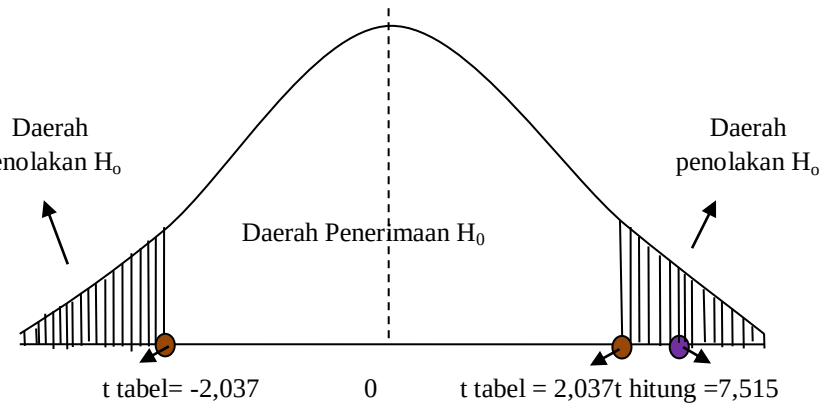
Berikut disajikan hasil penerapan secara parsial antara PADterhadap Belanja daerah dengan rumus *beta* X *zero order,* yaitu Variabel PAD = 0.444 x 0.972 x 100% = 43.16%, diketahui nilai koefisien determinasi PAD terhadap belanja daerah sebesar 43.16%, artinya variabel PAD secara parsial mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah sebesar 43.16%.

c. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.6
Hasil Uji-t Variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.729E7	5.919E7		-.292	.772
	X_1	1.303	.173	.444	7.515	.000
	X_2	1.313	.137	.566	9.585	.000

- Untuk uji hipotesis pengaruh antara PAD dengan Belanja Daerah diperoleh t_{hitung} = 7,515 > t_{tabel} = 2,037, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara PAD dengan Belanja Daerah.



Gambar 4.3 Kurva Uji Hipotesis Parsial PAD terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 7,515 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa PAD secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

5. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

a. Koefisien Korelasi Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Tabel 4.7
Korelasi antara Dana Perimbangandan Belanja Daerah

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.972	.980
	X1	.972	1.000	.933
	X2	.980	.933	1.000

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah, yaitu Koefisien korelasi antara dana perimbangan dengan belanja daerah, r = 0,972, ini berarti terdapat hubungan yang sangatkuatantara dana perimbangan dengan belanja daerah.

b. Koefisien Determinasi Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Tabel 4.8
Koefisien DeterminasiSecara Parsial
Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Model		Standardized Coefficients	Correlations		
		Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)				
	X1	.444	.972	.794	.159
	X2	.566	.980	.858	.203

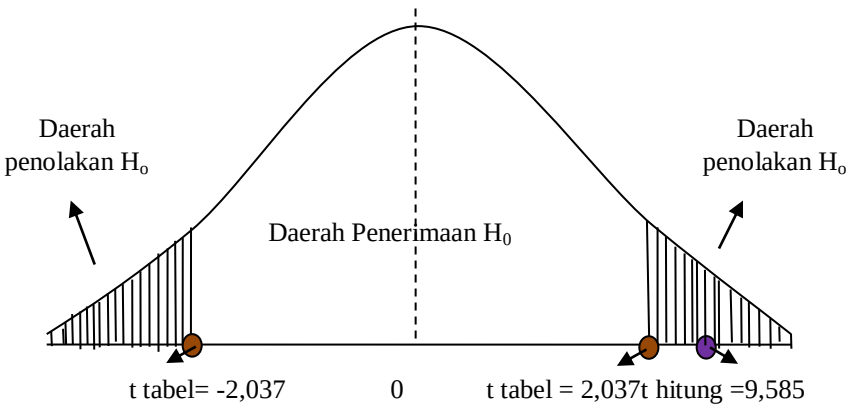
Berikut disajikan hasil penerapan secara parsial antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan rumus *beta* X *zero order,* yaitu Variabel dana perimbangan = 0.566 x 0.980 x 100% = 55.47%, diketahui nilai koefisien determinasi dana perimbangan terhadap belanja daerah sebesar 55.47%, artinya variabel dana perimbangan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah sebesar 55.47%.

c. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.13
Hasil Uji-t Variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.729E7	5.919E7		-.292	.772
	X_1	1.303	.173	.444	7.515	.000
	X_2	1.313	.137	.566	9.585	.000

- Untuk uji hipotesis pengaruh antara Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah diperoleh t_{hitung} = 9,585 > t_{tabel} = 2,037, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah.



Gambar 4.4 Kurva Uji Hipotesis Parsial Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 9,585 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa dana perimbangansecara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 43,16% dan sisanya yaitu 56,84% yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar PAD yaitu dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Koefisien korelasi PAD dengan Belanja Daerah didapat sebesar 0,972, ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara PAD dengan belanja daerah. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi PAD dengan belanja daerah adalah sangat kuat karena berkisar antara 0,800 sampai dengan 0,999, dan arahnya positif ini berarti apabila PAD meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat.

Terdapat fenomena dilapangan pada 3 periode dimana pada saat PAD turun belanja daerah naik yaitu periode ke 8, 24, dan 32. Dan terdapat fenomena pada 1 periode dimana pada saat PAD naik Belanja Daerah turun yaitu pada periode ke 15.

Dari hasil penelitian ini,naik turunnya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antar wilayah dan setiap tahunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selalu mengalami perubahan.Selain itu, terdapat juga perbedaan keperluan pada setiap daerah dalam membelanjakan anggarannya baik dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sesuai dengan pernyataan Jusuf Kalla (2014),kemajuan di daerah akan sangat bergantung kepada kemajuan sektoral dan kebijakan sektoral tidak akan berjalan jika tidak didorong kemajuan wilayah, namunmasalahnya adalah ketidakseimbangan antar wilayah.

Hasil penelitian ini juga menemukan fenomena dimana pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh daerah lebih kecil dari pada belanja daerahnya. Ini menunjukan bahwa Kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini belum membantu negara untuk menjadi negara yang sehat. Sesuai dengan ungkapan Jusuf Kalla (2014) Negara disebut sehat jika pendapatannya lebih besar dibanding pengeluarannya, namun yang terjadi di Indonesia selama ini justru sebaliknya.

Diharapkan Pemerintah-pemerintah Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa lebih meningkatkan lagi PAD-nya sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing, agar bisa meningkatkan anggaran belanja daerah untuk kemajuan daerahnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Haw Widjaja, 2009:42). Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar, 2009:171).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rima Marlia (2014) yang hasil penelitiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), jadi semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan Agus Prabawa (2009) bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 55.47%dan sisanya yaitu 44,53% yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar dana perimbangan yaitu PAD dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Koefisien korelasi antara dana perimbangan dengan belanja daerah sebesar 0,972, ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara dana perimbangan dengan belanja daerah. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi dana perimbangan dengan belanja daerah adalah sangat kuat karena berkisar antara 0,800 sampai dengan 0,999,

dan arahnya positif ini berarti apabila dana perimbangan meningkat dengan belanja daerah juga akan meningkat.

Terdapat fenomena dilapangan pada 5 periode dimana pada saat Dana Perimbangan turun belanja daerah naik yaitu periode ke 10, 16, 20, 22, dan 26. Dan terdapat fenomena pada 1 periode dimana pada saat Dana Perimbangan naik Belanja Daerah turun yaitu pada periode ke 15.

Dari hasil penelitian ini, naik turunnya penerimaan dana perimbangan dan belanja daerah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antar wilayah dan setiap tahunnya penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN kepada daerah selalu mengalami perubahan berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian.Selain itu, terdapat juga perbedaan keperluan pada setiap daerah dalam membelanjakan anggarannya baik dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Menurut Yuddy Chrisnandi (2015) Setiap pemerintah daerah (Pemda) yang mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 51% dari APBD, maka pemda bersangkutan dilarang melakukan pengadaan CPNS karena akan membebani APBN. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini hampir separuhnya atau lebih dari 50% pemda mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD-nya sendiri.

Diharapkan Pemerintah-pemerintah Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk lebih mengoptimalkan lagi dana yang bersumber dari APBN, agar dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat lebih efektif dan efisien penggunaannya. Pemerintah pusat juga mempunyai peran untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, karena menurut fenomena di atas masih banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa dana perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdul Halim, 2004:69).Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Hadi Sasana, 2011: 50).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rima Marlia (2014) yang hasil penelitiannya yaitu Dana Perimbangan berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara dana perimbangan dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), jadi semakin besar dana perimbangan maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja daerah sebagai berikut :

1. PAD secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Jika jumlah PAD semakin tinggi maka tingkat belanja daerah semakin meningkat.
2. Dana perimbangan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Jika jumlah dana perimbangan semakin tinggi maka tingkat belanja daerah semakin meningkat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam judul ini yaitu Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat mengenai pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Adapun saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1) Lebih meningkatkan lagi PAD-nya sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing, agar bisa meningkatkan anggaran belanja daerah untuk kemajuan daerahnya.
2) Lebih mengoptimalkan lagi dana yang bersumber dari APBN, agar dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat lebih efektif dan efisien penggunaannya.
3) Pemerintah pusat juga mempunyai peran untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, karena menurut fenomena di atas masih banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti yang melakukan penelitian yang sama di tahun-tahun berikutnya, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel lebih banyak agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta.

Adi Bhakti. 2013. *Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan)*. ISSN: 2338- 4603, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2, Oktober 2013.

Agus Prabawa. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas*. Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 12 Nomor 3, Agustus 2009 : 109 –179.

Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia.* PT. Raja Grafindo Persada.

Anak Agung Imas Permata dan I Made Jember. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan yang Dimoderasi Belanja Langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1, Januari 2014, Hal: 21-31.

Anak Agung Istri Agung Swandewi. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggarandan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. ISSN : 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.7 (2014) : 356-376.

Andi, S. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bogor.

Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia.* Jakarta.Penerbit Universitas Indonesia.

Bahtiar Arif, Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.

Budi S. Purnomo. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Budi Santosa. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 5, No. 2, Juli 2013, Hal: 130-143.

Ferry Prasetya. 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah*. Modul Ekonomi Publik. Universitas Brawijaya: Malang.

Gebriany Pirade Wenur. 2013. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung.* ISSN 2303-1174, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal: 626-633.

Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006–2008*. ISSN: 1693-9727, TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009, hal: 32 -50.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.

Hadi Sasana. (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.* Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46 – 58 Vol. 18, No. 1 ISSN: 1412-3126.

Hadi Soesantro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Ali, Sri Adiningsih. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir.* Kanisius. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harianto, David. Adi, Priyo Hadi. 2007.*Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. SNAX Unhass Makasar 26 - 28 Juli 2007.

Haw. Widjaja. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

I Dewa Gde Bisma, dan Hery Susanto, 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007.* Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010.

Indartik, Fitri Nurfatriani, Kirsfianti L. Ginoga. 2010. *Alternatif Mekanisme Distribusi Insentif REDD Melalui Dana Perimbangan Pusat Daerah*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 3 September 2010, Hal: 179 – 196.

Jan Hoesada. 2015. Melalui <http://www.ksap.org/sap/politik-hukum-otonomi-daerah-2015/>.

Jan Hoesada. 2014. Melalui <http://www.ksap.org/sap/akuntansi-lra-pemda-2014/>.

Jeckly Dharma Jaya dan Eka Ardhani Sisdyani. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi.* ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014), Hal: 162-179.

Juliana Florence Sorongan. 2013. *Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah Di Kabupaten Mihasa Selatan*. ISSN 2303-1174, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal: 171-180.

Julitawati, Ebit. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal. Aceh.

Jusuf Kalla. 2014. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/04/neij83-pemerintah-pusat-minta-daerah-berhemat-1>

Kansil dan Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Listiorini. 2012. *Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol.4 No. 2, Juli 2012.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009 . *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Nordiawan Deddi, Putra Iswahyudi Sondi, Rahmawati Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nunuy Nur Afiah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.

Oyok Abuyamin. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah.* Humaniora.

R. Putra Samad dan Rita Yani Iyan. 2013. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir*. ISSN : 2087-4502, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangnunan Tahun III No. 8, Maret 2013 : 103 – 122.

Republik Indonesia. 2004. *Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Pustaka Pergaulan: Jakarta.

Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Rima Marlia. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. Universitas Komputer Indonesia.

Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung.* ISSN: 2303-0178, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 10, Oktober 2014, Hal: 452-459.

Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung.* ISSN: 2303-0178, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 9, Oktober 2014, Hal: 420-427.

Setiadarma, Angela Andromeda. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* S1 thesis, UAJY. Yogyakarta.

Solvador Pinto. 2011. Melalui <http://www.budidarma.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>

Sony Yuwono, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayu Media.

Subowo dan Endar Rosita Wati. 2010. *Hubungan Antara PAD Dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemda Kudus.* ISSN 2085-4277,Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No. 2, September 2010, 73-82.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto, 2009. *STATISTIKA : Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Bandung: Graha Ilmu.

Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009-2013.

Uma Sekaran. 2006. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach 2nd Edition,* John Wiley and Son. New York.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yuddy Chrisnandi. 2015. Melalui <http://jabar.tribunnews.com/2015/03/10/menpan-yuddy-chrisnandi-bilang-yang-membebani-apbn-itu-seperti-ini>.